

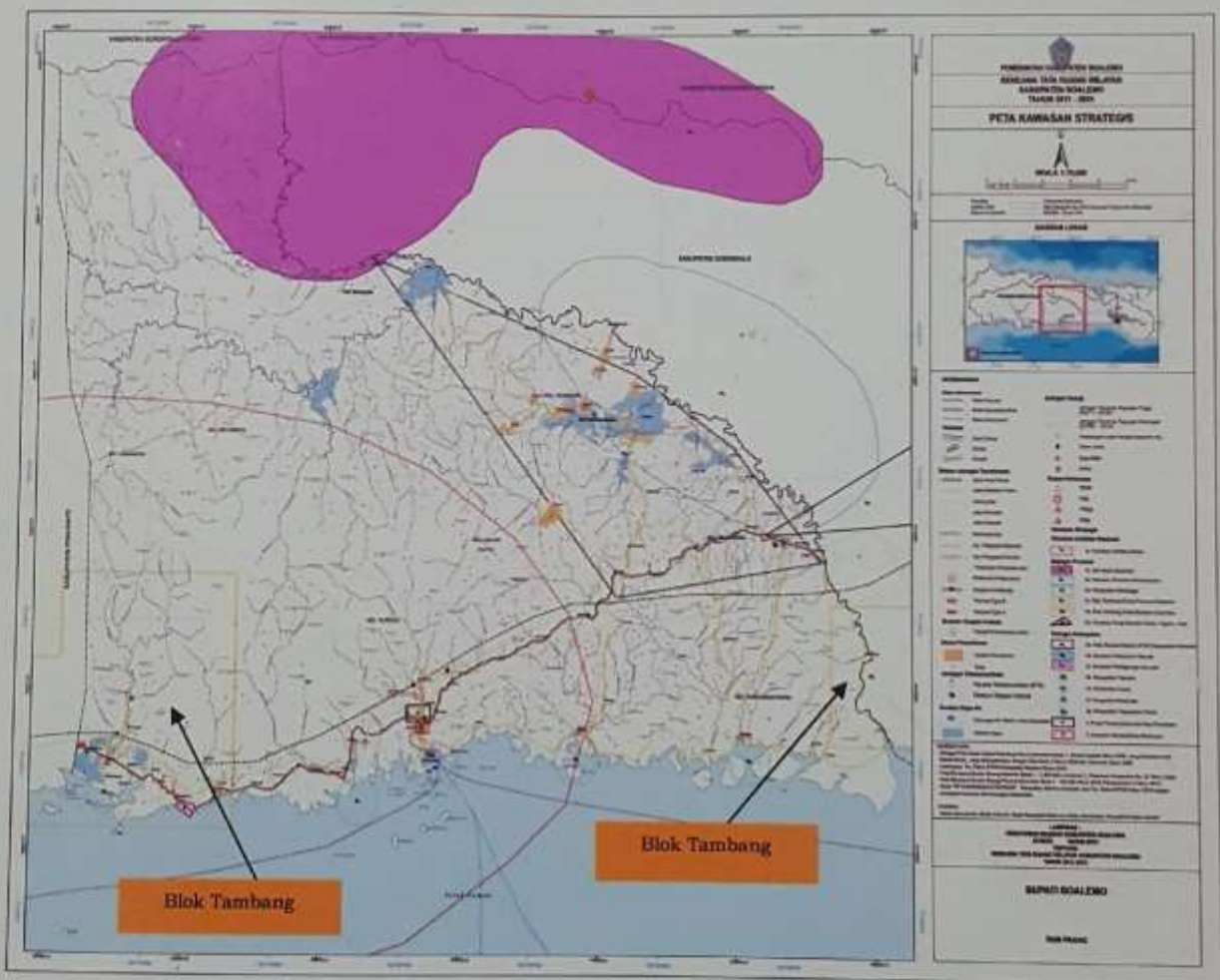
**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN BOALEMO**

Oleh:

TIM PENYUSUN



**KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2012**



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Boalemo

Nama Unit Kerja Pelaksana : Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo

Alamat Unit Kerja : Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Diusulkan melalui DIPA : Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boalemo Tahun 2012

Nomor Perjanjian Kerja : 01/Setda.2/S.Perjanjian kerjasama/Prog. Penataan perat.PerUU/XI/2012

Jenis Kegiatan : *Deskwork*, lapangan

Ketua Tim

a. Nama : Nurdin, SP, MSi

b. Pangkat/Golongan : Penata /IIIc

c. Jabatan : Lektor

Personalia

a. Peneliti : 3 orang staf peneliti


b. Teknisi : 2 orang teknisi

Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan (Agustus - Desember 2012)

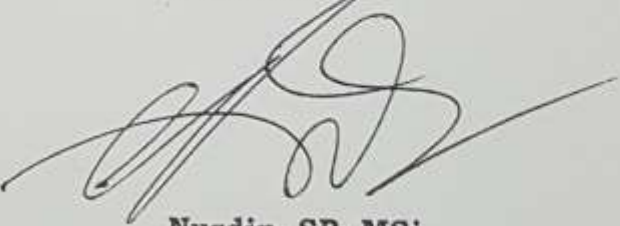
Instansi Pelaksana : Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boalemo

Sumber Biaya : APBD Kabupaten Boalemo TA. 2012

Tanggung Jawab Kegiatan
Bagian Hukum dan Organisasi
Kabupaten Boalemo



Nurdin Hemeto, SP, MM
196701301998031005

Tilamuta, Desember 2012
Ketua Tim,



Nurdin, SP, MSi
NIP. 19800419 200501103

Mengetahui,

Rektor
Universitas Negeri Gorontalo


Dr. I. Mahludin Baruwadi, MP
196507111991031003

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Gorontalo


Dr. Hj. Fitryane Lihawa, MSi
NIP. 196912091993032001

SUSUNAN TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
SETDA Kabupaten Boalemo

Penanggung Jawab Kajian : Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian
Universitas Negeri Gorontalo

Tim Penyusun

Ketua : Nurdin, SP, MSi

Anggota : Dr. Nur Mohamad Kasim, SH, MH
Akub Boesoera, SH, MH

Tenaga Administrasi : Linda Mohamad, SE

Operator Komputer : Ridwan Tahir, AMd

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.2 Praktik Empiris	8
BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	11
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	16
4.1. Landasan Filosofis	16
4.2. Landasan Sosiologis.....	21
4.3. Landasan Yuridis.....	23
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	29
5.1 Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.....	29
5.2 Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini	34
BAB VI PENUTUP	35
6.1. Kesimpulan.....	35
6.2. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	37

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Negara diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menguasai sumberdaya alam demi kelangsungan kemakmuran rakyat. Sesuai amanat UUD tahun 1945 Pasal 33 dan UU Nomor 4 tahun 2009, usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya strategis perencanaan terkait dengan pengawasan, sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat berwawasan lingkungan. Begitupun pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan dan lingkungan seyogianya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola usaha pertambangan perlu mengutamakan aspek wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

6.2 Saran

Bahwa berdasarkan uraian Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan, sehingga pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya mineral dan batu bara ini dikelola secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dengan disusunnya Naskah Akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012.

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN BOALEMO

01/ Setda.2/S.Perjanjian Kerjasama/Prog penataan Perat. PerUU/x# /2012.
Tanggal : 22 Oktober 2012

779 /07147.86/S.Perjanjian Kerjasama/Prog penataan Perat. PerUU/07/2012.
Tanggal : November 2012

Hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas,
bertindak lanjut dari Nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
Universitas Negeri Gorontalo Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Belas
yang bertanda tangan dibawah ini :

Ridwan Hemeto,SH,MM. : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan selanjutnya disebut sebagai pihak
Pertama.

Murdin,SP,Msi. : Dalam hal ini bertindak sebagai Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Negeri Gorontalo,
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Belah pihak sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Boalemo secara swakelola, dengan ketentuan
lainnya diatur berikut ini :

Pasal 1

Tugas dan Ruang lingkup Pekerjaan

Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di kabupaten Boalemo,
dengan focus pekerjaan:

- a. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan,
Mineral dan Batubara
- b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua wajib menerapkan prinsip koordinasi dengan Pihak Pertama, instansi terkait dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Produk Kerjasama yang akan dihasilkan oleh Tim dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Studi lapangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Membuat laporan kemajuan pekerjaan mengenai studi yang telah selesai dilaksanakan.

Mempresentasikan hasil pekerjaan.

Membuat Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan, dan Pernyataan selesainya Pekerjaan.

Pasal 2

Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua menjadi milik Pihak Pertama.

Untuk melaksanakan hal-hal untuk dan atas nama yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, pihak kedua menunjuk Tim Ahli dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo.

Tim Ahli sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Nurdin, SP, MSi (Ahli Tanah/Lingkungan)
- b. Dr. Nur M. Kasim, MH (Ahli Hukum)
- c. Akub Z. Boesoera, SH, MH (Ahli Hukum Lingkungan)

Pihak Kedua dapat menunjuk beberapa asisten untuk mendukung kerja Tim Ahli.

Pasal 3

Pembiayaan dan Cara Pembayaran

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Pihak Pertama menyediakan dana sebesar Rp. 83.560.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Boalemo.

Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Penggunaan dana yang diterima oleh Pihak Kedua dapat digunakan untuk biaya penyusunan Naskah Akademik dua Ranperda tersebut.

Semua dana/biaya yang diterima oleh Pihak Kedua harus dipertanggungjawabkan oleh Pihak kedua, dan harus dimasukkan /dilaporkan secara lengkap kepada pihak Pertama dan merupakan dokumen SPJ.

Jika terdapat kewajiban kepada Negara/Daerah baik PPN, PPh dan pajak lainnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

terhitung atas pemotongan tersebut pada ayat (5) akan dilakukan sesuai besarnya

pembayaran angsuran.